

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)

Oleh:

Erikha Viyurintina¹

Ersi Sisdianto²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: erikhaviyurintina@gmail.com

Abstract. *The progress of ongoing reforms in Indonesia suggests that the implementation of good governance has not been entirely successful. Issues like fraud and budget mismanagement persist, undermining the core principles of good governance. This study aims to assess the quality of financial reporting as a crucial aspect of good governance and explore how the Lampung Province government addresses challenges in preparing financial reports. The research employs a descriptive qualitative method, specifically averaging a case study approach and gathering data through interviews. The research results show that the Lampung Provincial Government needs to increase its efforts in realizing good governance since the issue of government corruption and fraud has spread among citizens; The setback faced by the Lampung Provincial government is the corrupt practices carried out by its employees. So the solutions that can overcome this are strengthening internal supervision, increasing human resource capacity, implementing an integrated financial information system, building an organizational culture with integrity, and collaborating with external parties.*

Keyword: *Local Government, Financial Reports, Good Governance.*

Abstrak. *Kemajuan reformasi yang sedang berjalan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya berhasil. Permasalahan*

Received March 29, 2024; Revised April 16, 2024; April 22, 2024

**Corresponding author: erikhaviyurintina@gmail.com*

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

seperti penipuan dan kesalahan pengelolaan anggaran masih terus terjadi, sehingga melemahkan prinsip-prinsip inti tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan sebagai aspek penting dalam tata kelola yang baik dan mengeksplorasi bagaimana pemerintah Provinsi Lampung mengatasi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan upayanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mengingat isu korupsi dan kecurangan pemerintahan sudah menyebar di kalangan masyarakat; Kemunduran yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung adalah praktik korupsi yang dilakukan para pegawainya. Maka solusi yang dapat mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, membangun budaya organisasi yang berintegritas, dan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, *Good Governance*.

LATAR BELAKANG

Tugas pemerintah daerah sebagai badan publik adalah menghadirkan layanan publik dan melakukan manajemen keuangan daerah. Tugas ini mendorong pemerintah daerah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara menyusun laporan keuangan daerah. Data-data yang terdapat dalam laporan keuangan yang diumumkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk mengetahui apakah dana yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sudah dimanfaatkan oleh pemerintah dengan bijaksana dalam menjalankan tugasnya (Sahertian, 2019).

Sebagai entitas yang memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah perlu menjalankan administrasi dengan transparan dan bertanggung jawab. Saat ini, partisipasi dalam membentuk sistem pemerintahan yang mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting. Bagian dari pemerintah daerah yang bertekad untuk mengelola keuangan di wilayahnya atau APBD tidak bisa dipisahkan, begitu pula pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas anggaran yang terkait dengan tugas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. (Aminy et al., 2021) Perkembangan teknologi dan ekonomi

serta penguasaan negara yang demokratis, bersih, adil, transparan dan bertanggung jawab. Maka pemerintah membutuhkan sebuah sistem tata kelola pemerintahan terkelola dengan baik.

Penggunaan prinsip tata kelola yang efektif adalah salah satu indikator sukses dalam pengelolaan aset pemerintah, terutama dalam hal keuangan yang menjadi hal krusial. Penerapan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab di tingkat pusat dan daerah menjadi penting sebagai penanda terwujudnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) yang optimal. Menurut (Widyaningrum et al., 2021) *Good Governance*, adalah Adalah wujud pengelolaan sistem pemerintahan yang tepat dalam konteks pemerintahan demokratis yang mampu mengatur serta memanfaatkan beragam sumber daya alam, sosial, dan ekonomi dengan baik berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara independen guna meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah yang lebih akurat, efisien, dan transparan.

Good Governance di Indonesia mulai dikembangkan dan diterapkan sejak era reformasi, yang ditandai dengan perombakan sistem pemerintahan yang mengadvokasi demokrasi yang bersih. *Good Governance* menjadi salah satu instrumen reformasi yang krusial dalam pemerintahan baru, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, meskipun reformasi telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum mencapai kesuksesan secara menyeluruh (Trinoviani, 2019). Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Masyarakat di berbagai daerah mulai memberikan perhatian terhadap isu tata kelola pemerintahan, khususnya terkait tata kelola keuangan di tingkat pusat dan daerah, karena hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta mencapai tujuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga sebagai pemangku kepentingan utama daerah. Saat ini, tata kelola keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya optimal mengingat masih adanya kebocoran keuangan daerah yang sering dilaporkan oleh berbagai media lokal. Oleh karena itu, pemerintah

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

daerah perlu bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada semua pemangku kepentingan terkait (Masnun, 2019a). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas uang publik yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Keuangan, yang digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Keterbukaan dalam penyajian Laporan Keuangan sangat penting guna menunjukkan tingkat akuntabilitas yang sebenarnya. Untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak auditor eksternal (Al Asyari & Helmy, 2020).

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang disusun untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah. Aspek-aspek yang tercermin dalam pengendalian internal mencakup keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Advia et al., 2023) Dalam studi yang berfokus pada pemerintah daerah Cianjur, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan juga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilengkapi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, secara rutin mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman dalam keuangan. SDM yang terampil ini akan lebih mampu memahami prinsip akuntansi dengan baik, sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan efisien dan efektif selama seluruh staf yang terlibat memahami konsep akuntansi (Herawati & Nopianti, 2019).

Jika informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah telah berhasil mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi persyaratan nilai informasi yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Jika informasi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan hukum, konsekuensinya dapat berupa kerugian keuangan daerah, potensi kekurangan dana, penurunan pendapatan, kelemahan administrasi, tidak efisiensi, dan tidak efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan, 2019).

Dalam penelitian ini, fenomena yang diamati adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 yang telah dinyatakan sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP dari BPK-RI ini berdasarkan kesimpulan bahwa LKPD Provinsi Lampung tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual, telah diungkapkan dengan memadai, dan tidak ada ketidakpatuhan. Laporan keuangan tersebut juga telah menyertakan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) seperti perlindungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. Keberhasilan meraih opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya bagi Provinsi Lampung, yang menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dan semua SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, seperti kualitas pegawai di pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja yang positif. Selain itu, penerapan *Good Governance* juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. *Good Governance* mencerminkan tata kelola yang baik, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta saling mengontrol satu sama lain untuk menciptakan kondisi yang ideal (Rizki Afri Mulia, 2019).

Penelitian ini mengacu pada (Herawati & Nopianti, 2019) Tentang bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah dan *Good Governance* memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian terbaru merekomendasikan penambahan

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penggunaan variabel tersebut dipilih karena terdapat perbedaan hasil antara penelitian sebelumnya. Penelitian dari (Hosana et al., 2023) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh cara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya hasil penelitian oleh (Zumar & Haryanto, 2021) meskipun menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berdampak signifikan pada kualitas laporan keuangan, peneliti tertarik untuk menemukan kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara kualitas laporan keuangan dan tercapainya *Good Governance*, serta memberikan solusi bagi pemerintah provinsi Lampung dalam mengatasi hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah Daerah

Sebagai penyelenggara layanan publik, tanggung jawab penuh pemerintah daerah adalah untuk memberikan layanan yang optimal kepada warga di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan desentralisasi, dekonsentrasi, dan membantu pemerintah pusat sebagai perwakilan di daerah otonom. Fungsi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mencakup: (Mbipi et al., 2021):

1. Pemerintah daerah mengelola dan mengurus sendiri pemerintahan lokal sesuai dengan prinsip otonomi dan peran bantuannya.
2. Melaksanakan otonomi sebesar-besarnya, kecuali dalam hal-hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing wilayah.
3. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah menjalin hubungan dengan pemerintah pusat yang mencakup aspek wewenang, keuangan, layanan umum, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. (Adi, 2019).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penjelasan tentang aktivitas suatu entitas selama periode akuntansi tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai kinerja entitas tersebut. Ini adalah laporan yang sistematis yang mencakup situasi keuangan dan aktivitas yang dilakukan oleh entitas tersebut. Laporan keuangan tidak hanya sebagai kumpulan data

tetapi juga sebagai informasi yang berarti, yang bisa memberikan wawasan yang berharga setelah diolah ke dalam konteks yang sesuai (Makalikis et al., 2022). Tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang keadaan keuangan, pencapaian anggaran, aliran kas, dan performa keuangan suatu entitas yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait penyaluran sumber daya.

Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pemerintahan terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya, dengan menekankan (Septi Masitoh et al., 2020):

1. Memberikan informasi tentang status aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Memberikan informasi tentang perubahan dalam status aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Memberikan informasi tentang asal, alokasi, dan penggunaan aset ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap anggaran yang telah disetujui.
5. Memberikan informasi tentang cara entitas pemerintah mendanai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam mendukung kegiatan pemerintah.
7. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan entitas pemerintah dalam mendanai kegiatan.

Laporan keuangan umumnya memiliki peran prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang dapat membantu dalam memperkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan juga memberikan informasi bagi pengguna tentang (Sari & Fadli, 2019): Tanda-tanda apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan Tanda-tanda apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh badan legislatif. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan memberikan informasi tentang entitas pelaporan dalam hal (Nurhadianto & Khamisah, 2019): Informasi mengenai: a. Aset; b. Kewajiban; c. Ekuitas dana; d. Pendapatan; e.

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Belanja; f. Transfer; g. Pembiayaan; dan h. Arus kas. Meskipun informasi dalam laporan keuangan relevan untuk mencapai tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak selalu memenuhi sepenuhnya tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat disajikan bersamaan dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Good Governance

Istilah *Good Governance* pertama kali muncul dalam World Development Report tahun 1989 yang merujuk pada tata kelola pemerintahan yang terpercaya dan bertanggung jawab, tata kelola yang efektif, dan pemerintahan yang transparan. *Governance* adalah cara mengelola urusan publik. Menurut *World Bank*, *governance* dalam sektor publik adalah cara di mana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat. Sementara itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) fokus pada *governance* dalam aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola negara. *Political governance* berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, *economic governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi yang mempengaruhi isu-isu seperti pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administrative governance* berkaitan dengan implementasi kebijakan (AgustiningTyas et al., 2020).

World Bank mengartikan *Good Governance* sebagai manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, serta mencegah kesalahan alokasi dana investasi dan korupsi baik dari segi politik maupun administratif. Selain itu, *Good Governance* juga mencakup disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung aktivitas bisnis. Konsep *Good Governance* pada dasarnya adalah tentang proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara kolektif. Ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam mengelola pemerintahan suatu negara. Memahami *Good Governance* kunci utamanya terletak pada pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menilai kinerja suatu pemerintahan (Paramita & Mirna Amirya, 2019). Baik buruknya pemerintahan bisa

dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Berikut diuraikan prinsip-prinsip *Good Governance*.

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah yang mencerminkan kepentingan mereka. Partisipasi penuh ini bergantung pada kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, serta kemampuan untuk ikut serta secara produktif. Tujuan dari partisipasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengakomodasi berbagai masalah yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengemukakan pendapat mereka. Saluran komunikasi ini meliputi pertemuan umum, dialog, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Salah satu cara lain untuk mendorong keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk mengatur agenda pembangunan, serta melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung, serta adanya mekanisme konsultasi untuk menangani isu-isu sektoral (Utomo et al., 2021).

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik memerlukan sistem hukum yang jelas dan aturan yang ditegakkan. Dalam usaha mencapai konsep *Good Governance*, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip *rule of law* seperti supremasi hukum, kepastian hukum, *responsivitas* hukum, penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diterapkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam konteks hak asasi manusia.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip penting dalam menjaga keterbukaan atas semua langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip ini membangun kepercayaan saling antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan akurat. Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang disediakan

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

harus mudah dipahami dan dipantau. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mengurangi pelanggaran terhadap hukum.

4. Peduli pada *Stakeholder*/Dunia Usaha

Lembaga-l embaga dan semua proses pemerintahan harus berusaha memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktik bisnis, korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pelaksanaan *Good Governance* di dalam lembaga mereka. Mengimplementasikan *Good Governance* secara benar dan konsisten dalam dunia bisnis merupakan bentuk dari praktik etika yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan. Etika bisnis juga merupakan unsur fundamental dari konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan kontribusinya. Praktik *Good Governance* menjadi pedoman dalam operasional perusahaan, baik dalam kegiatan internal maupun hubungan perusahaan dengan pihak lain, termasuk masyarakat umum. Aspek internal mencakup operasional perusahaan dan cara kerja perusahaan itu sendiri, sementara aspek eksternal berhubungan dengan cara perusahaan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lain, termasuk publik. (Haeli, 2020).

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Mengatakan bahwa segala keputusan harus disepakati melalui proses musyawarah untuk mencapai konsensus. Pendekatan pengambilan keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan semua atau sebagian besar pihak terlibat, tetapi juga untuk menciptakan keputusan yang diakui bersama dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan untuk mendorong seluruh komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu diterapkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, dimana hal-hal yang dikelola merupakan persoalan publik yang harus bertanggung jawab kepada rakyat. Semakin banyak partisipasi dalam pengambilan keputusan, semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang tercermin. Sistem pemerintahan yang efektif harus menghubungkan berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus menyeluruh mengenai upaya terbaik bagi

beragam kelompok masyarakat, serta idealnya, mencapai konsensus tentang kebijakan dan prosedur yang akan dijalankan.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan merujuk pada prinsip kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan terhadap semua anggota masyarakat. Hal ini memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan juga membantu membangun saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang penting dan memastikan akses yang mudah kepada informasi yang akurat. Informasi dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat agar dapat ikut serta dalam pengelolaan daerah mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk secara proaktif menyediakan informasi lengkap mengenai kebijakan dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti brosur, leaflet, pengumuman di media cetak maupun elektronik lokal agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang transparan tentang cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Untuk mendukung prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu harus bermanfaat dan berhasil terlaksana. Kriteria efektifitas biasanya diukur melalui hasil produk yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan dapat mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik, para pejabat pemerintah perlu mampu merancang perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta dirancang dengan logis dan terukur. Dengan perencanaan yang dibuat secara logis tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dengan lebih mudah karena program-program ini akan menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. (Tullah et al., 2021).

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab para pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan wewenang agar mereka mengurus kepentingan masyarakat tersebut. Para pengambil keputusan di tingkat pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga yang terkait. Bentuk pertanggungjawaban dapat bervariasi tergantung jenis organisasi yang bersangkutan. Landasan utama dari akuntabilitas adalah regulasi yang berlaku, didukung oleh komitmen politik terhadap akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawaban. Instrumen pendukung lainnya termasuk kode etik perilaku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan, serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas (Masnun, 2019b).

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis menggambarkan pandangan jangka panjang untuk menghadapi masa depan. Pemimpin dan masyarakat memiliki wawasan yang luas dan progresif mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan manusia, serta kepekaan terhadap kebutuhan untuk mencapai kemajuan tersebut. Mereka juga harus memahami kerumitan sejarah, budaya, dan konteks sosial yang menjadi landasan bagi visi tersebut. Terkait laporan keuangan, prinsip-prinsip tata kelola yang baik memiliki aspek tersendiri (Tullah et al., 2021).

Prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut diuraikan sebagai berikut (Agung & Mulyani, 2020):

1. Prinsip Keadilan (*Fairness*) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dianggap wajar jika mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang dianggap wajar mencerminkan ketiadaan kesalahan materiil dan dipresentasikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Prinsip Akuntabilitas menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan merupakan sarana pengawasan yang efisien.
3. Prinsip Keterbukaan (*Transparansi*) menuntut pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, serta dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan pemerintah.

Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibilitas*) mencakup bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini mencakup kutipan-kutipan yang diambil dari wawancara, dokumen resmi, literatur, dan referensi lain yang relevan. Peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali informasi tentang situasi yang sedang berlangsung pada subjek penelitian yang dipilih, dan kemudian mendokumentasikan hasil temuannya dengan data berupa teks, citra, bukan angka. Peneliti juga bertujuan untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai fakta-fakta serta interaksi antara fenomena yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini. (Sarmanu, 2019) Studi kasus adalah analisis mendalam tentang satu latar belakang, subjek tunggal, tempat penyimpanan dokumen, atau naratif tertentu. Definisi lain menjelaskan studi kasus sebagai pemeriksaan menyeluruh tentang aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang memiliki batasan yang jelas (Sarmanu, 2019).

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No.56, Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih Pemerintah Provinsi Lampung sebagai tempat penelitian karena ingin mengeksplorasi apakah Pemerintah daerah tersebut memiliki dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai *Good Governance*. Dasar yang dimaksud adalah laporan keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus penelitian adalah mengenai kualitas laporan keuangan Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti memilih empat subjek. Pertama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipilih karena perannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Subjek kedua adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah. Selanjutnya, Inspektorat

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Provinsi Lampung dipilih karena perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Subjek terakhir adalah masyarakat Bandar Lampung, dipilih karena merupakan salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 serta sebagai faktor penentu keberhasilan *Good Governance*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Peneliti memandang bahwa metode tersebut cocok dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diharapkan akan menghasilkan data yang relevan. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk berinteraksi dengan narasumber terkait guna mendalami peristiwa yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat meraih jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara tak terstruktur. Berdasarkan pernyataan Lincolnd dan Guba (1985:269) dalam (Alsa, 2020), Wawancara tak terstruktur adalah tipe wawancara yang melibatkan dialog yang mendalam di antara pewawancara dan narasumber, di mana keduanya dapat berinteraksi seperti teman. Wawancara ini mengadopsi gaya percakapan yang santai dan terbuka, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang yang dianggap relevan. Dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan subjek-subjek yang akan diwawancarai. Subjek yang dipilih harus relevan dengan tujuan penelitian.
2. Menyiapkan topik-topik yang akan dibahas selama wawancara.
3. Melakukan wawancara dengan setiap subjek yang telah dipilih secara individual.
4. Membuat catatan mengenai hasil wawancara.
5. Mengonfirmasi kesimpulan dari hasil wawancara dan mengakhiri sesi wawancara.
6. Mengidentifikasi temuan yang didapat dari wawancara.

Teknik Analisis Data

Miles dan Hubberman (1984) dalam (Sarmanu, 2019) Menyatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif masih menantang karena belum tersedia metode analisis yang terstandarisasi, sehingga analisis data kualitatif memerlukan pendekatan

yang interaktif dan berkelanjutan. Aktifitas-aktifitas tersebut menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam (Alsa, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data adalah langkah untuk mengambil data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumen penelitian.
2. Reduksi data merupakan proses seleksi, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan atau sumber informasi.
3. Penyajian data melibatkan pengaturan informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Presentasi data kualitatif dapat berupa narasi, grafik, dan diagram.
4. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Good Governance* yang telah dijelaskan tampak dengan jelas dalam proses perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan terhadap manajemen dan tanggung jawab keuangan pemerintah. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan mencerminkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan fondasi penting bagi prinsip *Good Governance* yang menjadi syarat esensial dalam sistem demokrasi dan ekonomi yang sebenarnya. Sebagai lembaga auditor eksternal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK juga mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk memastikan bahwa hasil audit terhadap pemerintah daerah mencerminkan kualitas laporan keuangan mereka (Purwanti, 2022). Sebagai pemeriksa independen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi keuangan dengan memberikan opini independen mengenai kesesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan. Manfaat informasi akuntansi dalam laporan keuangan tergantung pada kesesuaian penyajian yang dapat tercapai melalui substansi bukti yang valid dan presentasi yang memadai. Dengan prinsip fairness, auditor membantu para pemangku kepentingan dalam

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

mengevaluasi kemajuan dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Auditor juga berperan dalam mempertahankan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, tugas auditor pemerintah (BPK) adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap manajemen dan tanggung jawab seluruh aspek keuangan negara (Azlina, 2019).

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Syarat Terwujudnya *Good Governance*

Hubungan antara kualitas laporan keuangan dan implementasi tata kelola yang baik sangat pada erat. Menurut Fredy, seorang inspektur Inspektorat di Provinsi Lampung, laporan keuangan merupakan bagian penting dalam penilaian kualitas kinerja pemerintah dan pembangunan. Pernyataan ini juga disetujui oleh Suliani, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, dan Anas, Pelaksana Tugas Kepala Dispenda, yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang baik akan membawa dampak positif terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah yang pada akhirnya memengaruhi respon positif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah ini atas juga mempengaruhi penentuan kualitas laporan. Pandangan yang sejalan diungkapkan oleh Indra Lesmana, Kepala Bidang Aset BPKAD, bahwa Provinsi Lampung memandang bahwa hanya menyajikan jumlah pendapatan dan belanja tidak cukup jika tidak didasari pada nilai-nilai normatif dalam penyajian laporan keuangan. Anas, PLt Kepala Dispenda, menambahkan, bahwa laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berarti laporan yang berisi angka belaka. Komponen-komponen laporan keuangan serta aturan dan norma pencatatan harus diperhatikan dan juga perlu mempertimbangkan siapa saja yang akan menggunakan laporan tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang ada. Namun, terjadi perbedaan pandangan dengan masyarakat setempat. Warga Lampung masih meragukan tingkat keandalan dan kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut. Keraguan ini dipicu oleh opini wajar dengan pengecualian aset tetap yang dikeluarkan oleh BPK, serta kasus dugaan korupsi di pemerintah Provinsi Lampung yang belum terselesaikan. Menurut Andre Lesmana, seorang warga, kasus korupsi yang terjadi di pemerintah Provinsi Lampung sudah lama berlangsung, namun hingga saat ini masih banyak yang belum diselesaikan. Oleh karena

itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini menjadi tergantung pada tindakan nyata yang diambil.

Selain fenomena keandalan terhadap laporan keuangan di atas, terwujudnya *Good Governance* di pemerintah Provinsi Lampung harus diukur berdasarkan reaksi yang diberikan masyarakat terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang di dasarkan oleh laporan keuangan (Putri Herinda & Sulistiyowati, 2023). Andre Lesmana (masyarakat) Dikatakan bahwa di setiap daerah, pasti terdapat pihak yang mendukung pemerintah dan pihak yang tidak setuju, dengan masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah namun juga ada yang merasa puas. Yang penting, menurut wawancara tersebut, adalah bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan didengar oleh pemerintah, yang dianggap sebagai hal positif. Contohnya, terkait kasus dan hibah sebelumnya, setelah aspirasi dan laporan disampaikan, proses akan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Mewujudkan *Good Governance* tergantung pada usaha pemerintah daerah untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan prinsip utama *Good Governance*. Menurut Tin Yuliani, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, pemerintah setempat telah berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen dalam pertanggungjawaban dana dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan keuangan tersebut mencakup seluruh informasi mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penjelasan penggunaan dana yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (Mudhofar, 2022). Pemerintah Provinsi Lampung mencatat penggunaan dan alokasi sumber daya ekonomi dalam laporan realisasi anggaran. Selain laporan keuangan, pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyusun Laporan Kinerja Keuangan Pemerintah (LAKIP) untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam pengelolaan kekayaan daerah. Suliani, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, menyatakan bahwa agar laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung mampu mencerminkan pertanggungjawaban pihaknya, mereka menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti Undang-Undang No. 17 dan Peraturan Pemerintah No. 24. Di dalamnya dijelaskan bahwa pihaknya harus melaporkan realisasi anggaran yang mencakup penggunaan sumber daya

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

ekonomi yang dikelola serta alokasinya, bersama dengan informasi lainnya. Mereka juga mencatat pencapaian kinerja selama satu tahun dengan jelas dan transparan.

Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang bagaimana keuangan pemerintah dikelola. Dalam mencapai transparansi, pemerintah diharapkan untuk memberikan informasi keuangan secara terbuka dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan akses masyarakat terhadap informasi yang ada. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangannya. Langkah pertama adalah dengan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang mencakup informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan. Langkah kedua adalah dengan menyampaikan hasil pengelolaan keuangan kepada lembaga perwakilan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan teknologi internet dengan memiliki website yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya website ini, pemerintah Provinsi Lampung berharap masyarakat dapat mengakses informasi dan berita mengenai kinerja pemerintah dengan lebih mudah dan transparan.

Setelah mempertimbangkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa meskipun laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung telah disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, masih ada ruang untuk perbaikan agar dapat mendukung tercapainya *Good Governance*. Hal ini sejalan dengan komentar Fredy, Inspektur Inspektorat Provinsi Lampung, yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal namun masih diperlukan banyak perbaikan untuk mencapai *Good Governance* yang ideal. Permasalahan yang masih tertunda harus diatasi sebelum mencapai tingkat ideal tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa aspek yang perlu diperbaiki termasuk penyajian laporan keuangan secara jujur dan transparan. Selain itu, kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah Provinsi Lampung juga menjadi hambatan bagi upaya mencapai *Good Governance*.

Kendala pada Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pemerintah daerah dapat menghadapi beberapa hambatan dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Kendala tersebut dalam penyusunan laporan keuangan

ini adalah keadaan yang menghambat tercapainya kondisi ideal dalam menyediakan informasi akuntansi. Menurut PP No.71 tahun 2010, kendala-kendala tersebut dapat disebabkan oleh materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, serta keseimbangan antara karakteristik kualitatif. (Sahertian, 2019). Menurut Ahmad Sutrisno, Kepala BPKAD, ketiga faktor tersebut memunculkan situasi yang menantang dalam proses penyusunan laporan keuangan. Situasi ini merupakan dilema karena pemerintah daerah harus memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun di sisi lain juga diharapkan menyajikan laporan keuangan yang memberikan manfaat lebih besar daripada biayanya. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyertakan informasi yang memiliki kepentingan yang signifikan sehingga memerlukan upaya penghapusan informasi keuangan yang tidak relevan.

Suliani (Kepala Bidang Akuntansi BPKAD) Perkataan tersebut menyatakan bahwa situasi seperti ini sering membuat kekhawatiran di kalangan pemerintah. Jika para pegawai bersikap jujur dan tidak mementingkan diri sendiri, maka kondisi semacam ini bisa diatasi dengan mudah. Namun, jika ada ketidakjujuran, hal tersebut bisa menjadi masalah bagi instansi. Berdasarkan pernyataan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik kualitatif adalah kesalahan pencatatan dan penghapusan informasi yang dilakukan oleh individu yang memanfaatkan situasi. Tindakan pencatatan yang sengaja dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini dapat berdampak pada keputusan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan informasi keuangan.

Solusi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Menyelesaikan Kendala

Solusi-solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung:

a. Penguatan Pengawasan Internal dan Audit

Pengawasan internal adalah proses di mana pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa aturan dan prosedur diikuti dengan benar dalam pencatatan keuangan. Misalnya, mereka dapat memastikan bahwa ada proses verifikasi dan validasi yang ketat sebelum data keuangan disimpan. Audit internal adalah proses evaluasi independen terhadap efektivitas pengendalian internal. Ini dilakukan oleh

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

tim audit internal yang bertugas meninjau proses-proses keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan (Aminy et al., 2021).

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan agar memahami pentingnya integritas dalam pekerjaan mereka. Pelatihan dapat mencakup pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku dan praktik terbaik dalam pencatatan keuangan. Pemerintah Provinsi Lampung juga bisa mendorong budaya saling memantau di antara karyawan, di mana mereka saling mengingatkan dan mendukung untuk menjaga integritas dalam bekerja.

c. Implementasi Sistem Informasi Keuangan yang Terintegrasi

Sistem informasi keuangan terintegrasi adalah program komputer yang digunakan untuk mengelola semua aspek keuangan pemerintah, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan. Sistem ini akan menghubungkan berbagai bagian pemerintah yang terlibat dalam keuangan, memastikan bahwa data yang sama digunakan oleh semua orang. Dengan sistem yang baik, data keuangan akan tercatat secara otomatis dan dilakukan validasi secara langsung, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan.

d. Membangun Budaya Organisasi yang Berintegritas

Budaya organisasi adalah serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang diterima oleh anggota organisasi. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mempromosikan budaya di mana kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dihargai dan didorong. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang konsisten tentang pentingnya integritas, memberikan penghargaan kepada mereka yang menunjukkan perilaku etis, dan menegakkan sanksi bagi pelanggar.

e. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah langkah penting dalam memastikan independensi evaluasi terhadap laporan keuangan. BPK dapat memberikan pandangan independen tentang keadaan keuangan pemerintah Provinsi Lampung dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain BPK, pemerintah Provinsi Lampung juga dapat bekerja sama dengan lembaga independen lainnya yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara komprehensif, diharapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengatasi kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas serta integritas dalam proses keuangan.

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan perbaikan pada laporan keuangannya untuk mencapai tata kelola yang baik. Hal ini disebabkan oleh asumsi masyarakat Provinsi Lampung yang masih meragukan tingkat kejujuran pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Ketidakpercayaan ini diperkuat oleh kasus-kasus korupsi yang masih terjadi di pemerintahan Provinsi Lampung. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh individu yang memanfaatkan kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kualitas laporan keuangan yang diinginkan. Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, seperti penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi keuangan yang terintegrasi, pembangunan budaya organisasi yang berintegritas, dan kolaborasi dengan pihak eksternal, diharapkan bahwa mereka dapat mencapai tujuan ini

DAFTAR REFERENSI

- Adi, A. S. (2019). LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: Mengerek Responsi dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Suatu Keniscayaan. *Jurnal Akutansi Dan Auditing*, 7(2), 134–146.
- Advia, R., Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya). *Balance: Media Informasi Akutansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8552>
- Agung, M. F., & Mulyani, S. (2020). PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN LATAR BELAKANG PROFESI KEPALA DAERAH TERHADAP KUALITAS

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *SIKAP*, 4(2), 142–159.

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Al Asyari, S., & Helmy, H. (2020). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2314–2330.
- Alsa, A. (2020). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasi Dalam Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Azlina, N. (2019). *Good Governance* Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris OPD Kabupaten Solok). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 9–24. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v14i1.5>
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Jurnal Bestari*, 1(1), 1–9.
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR – Study & Accounting Research*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i2.10>
- Hosana, A. T., Rispantyo, & Widarno, B. (2023). PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGANKDENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar). *The Elgar Companion to the OECD*, 2(1), 256–265.

<https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.21.132>

- Kurniawan, I. S. (2019). DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Kinerja : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 47–58.
- Makalikis, D. C., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2022). Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 285–292. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/37352/34672>
- Masnun. (2019a). *GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: SUATU KAJIAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI. EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business*, 2(1), 13–28.
- Masnun, M. (2019b). *Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 175. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.41>
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Paramita, S. C., & Mirna Amirya. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Skpd Di Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(1).
- Purwanti, A. (2022). Implementation of *Good Governance* in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>
- Putri Herinda, D. Y., & Sulistiyowati, F. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, SISTEM

GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

- INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH, DAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada SKPD dan OPD Kabupaten Sleman). *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS (JMB)*, 2(1), 196–200.
- Rizki Afri Mulia. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 1–15.
- Sahertian, A. B. (2019). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SYARAT TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kediri). *Akuntansi UB*, 2(1).
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>
- Sarmanu. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Statistika*. Airlangga University Press.
- Septi Masitoh, Tullah, D. S., & Apriyanti, E. (2020). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2), 18–26. <https://doi.org/10.54526/jes.v5i2.36>
- Trinoviani, I. (2019). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BENGKULU. *Asdaf*, 2(september), 1–6.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Suryati, E. (2021). FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL AKUNTANSI*, 8(2), 179–188.
- Utomo, A. C., Suyanto, S., & Riyanto, K. B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro). *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 2(2), 145–152.
- Widyaningrum, K., Mintarti, S., & Priyagus. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap *Good Governance*

di perguruan tinggi negeri non Badan Layanan Umum wilayah Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 6(1).

Zumar, A., & Haryanto, H. (2021). Studi Pada Seluruh Skpd Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.